PEMERINTAHAN-GAMPONG
2022
QANUN NO 1, LK 2022/NO 1, 68 HLM.
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG GAMPONG

ABSTRAK

- Gampong perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan Sejahtera; Berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota; bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU (drt) Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011.

- Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang Penggabungan Gampong, Penetapan Gampong, Kewenangan Gampong, Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pakaian Dinas, Atribut dan Jam Kerja Pemerintah Gampong, Hak dan Kewajiban Gampong dan Masyarakat Gampong, Peraturan di Gampong, Keuangan dan Aset Gampong, Pembangunan Gampong, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Gampong, Kerja Sama Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun Kabupaten Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2022.

- Penjelasan 12 hlm.